

## PERAN KEPEMIMPINAN PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DESA KADUDAMPIT, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT

Muhammad Alfin Nur Hisyam<sup>1</sup> Nadia Puspita Ramadhani<sup>2</sup> Oktavia Amanda<sup>3</sup> Tsabita Nasya  
Fakhrana<sup>4</sup> Ellies Sukmawati<sup>5</sup> Pia Khoirotun Nisa<sup>6</sup>  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
e-mail: [oktavia.amanda19@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:oktavia.amanda19@mhs.uinjkt.ac.id)

### **Abstrak**

*Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial tunai bersyarat oleh Kementerian Sosial sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dalam praktiknya untuk membuat Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif dan efisien maka di suatu daerah/desa dibagi menjadi beberapa kelompok penerima manfaat yang dipimpin oleh seorang ketua kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan oleh ketua kelompok pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketua kelompok PKH memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan PKH, yaitu ketua kelompok PKH mempengaruhi kelompok (anggota) untuk mencapai tujuan bersama terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun indikator atau kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah objektivitas, ketangkasan komunikasi dan sosial, ketegasan, kesadaran diri sendiri, dan mengajarkan sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dapat berhasil dan berfungsi sebagaimana mestinya.*

**Kata kunci :** peran, pemimpin, program keluarga harapan (PKH)

### **Abstract**

*Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional cash transfers program by the Ministry of Social Affairs as an effort to accelerate poverty reduction in Indonesia. In practice, to make Program Keluarga Harapan (PKH) more effective and efficient, an area/village is divided into several beneficiary groups led by a group leader. This study aims to describe the role of leadership by group leaders in the Program Keluarga Harapan (PKH) in Kadudampit Village, Sukabumi Regency, West Java. The method used in this study is a qualitative approach methodology with descriptive research and data collection techniques through observation and interviews. The types and sources of data used in this study are primary data. The results of this study indicate that the PKH group leader has a very important role in supporting the success of PKH, namely the PKH group leader influences the group (members) to achieve common goals related to Program Keluarga Harapan (PKH). The indicators or qualifications that must be possessed by a leader are objectivity, communication and social agility, assertiveness, self-awareness, and teaching so that Program Keluarga Harapan (PKH) in Kadudampit Village, Sukabumi Regency, West Java can succeed and function properly.*

**Keywords :** role, leader, program keluarga harapan (PKH)

## **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan mempunyai kaitan yang erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat agar terwujudnya sebuah kesejahteraan. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah

dituntut untuk lebih memperhatikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kemampuan masyarakat dapat diukur dan dilihat dari bagaimana masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya agar tercapainya kesejahteraan masyarakat (Utomo et al., 2014).

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit untuk diselesaikan sehingga pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan ini sendiri. Adanya kontribusi dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga miskin yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Program ini sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2007 ([Program Keluarga Harapan \(PKH\) | Kementerian Sosial Republik Indonesia \(kemensos.go.id\)](#)). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (dalam Utomo et al., 1996) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin terbawah berupa bantuan bersyarat. Terdapat komponen yang berhak mendapat bantuan PKH yaitu Ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA, disabilitas berat, dan lanjut usia. Bagi warga yang mendapatkan bantuan atau yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diwajibkan untuk memenuhi persyaratan terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu KPM harus hadir pada fasilitas kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan (fasdik).

Kementerian sosial membentuk Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) yang dibentuk pada tingkat pusat dan daerah sebagai suatu dukungan agar tercapainya keberhasilan PKH. UPPKH dilengkapi dengan Sistem Informasi Manajemen PKH (SIM-PKH) berbasis komputer, dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, tersedia

pendamping PKH dan ketua kelompok (Fitrianingrum & Suyanto, 2014).

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadudampit memiliki 11 kelompok PKH yang di dalamnya terdapat ketua dan anggota kelompok. Ketua kelompok direkrut dari masyarakat sendiri yang fungsinya menjadi penyambung informasi ataupun mediator dari pendamping sosial ke anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan juga mendata pencairan dana PKH setiap 4 bulan sekali dalam setahun.

Rivai (dalam Alfiah & Syafriani, 2019) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individu dan organisasi, sehingga dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Menurut pendapat Rivai (dalam Akbar, 2017) peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin. Dalam menjalankan peran sebagai ketua kelompok tentu saja sebelum terjun kelapangan ketua kelompok diberikan bekal pengetahuan terkait bagaimana cara mendampingi KPM PKH yang nantinya dapat mengarahkan para penerima PKH dalam melaksanakan kewajibannya. Suatu program dapat dikatakan berhasil tergantung dari peran ketua sebagai seorang pemimpin yang mampu menjembatani antara pemerintah dan pendamping PKH. Oleh karena itu, peran ketua kelompok sangatlah penting dalam kesuksesan program tersebut.

Dalam menggerakkan sumber daya manusia diperlukan seorang pemimpin yang berkualitas. Salah satu faktor yang dapat dilihat dalam menilai berkualitas atau tidaknya seorang pemimpin termasuk pendapat Werren Bennis & Burt Nanus (dalam Daswati, 2012) mengatakan bahwa

kepemimpinan dapat dilihat dari aspek peran sebagai penentu arah, agen perubahan, juru bicara dan pelatih.

Peran kepemimpinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam menciptakan efektivitas kerja sebuah kelompok. Keberhasilan yang dicapai dan kegagalan yang dialami oleh sebuah kelompok tidak dapat dipungkiri sangat ditentukan oleh peran pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai efektivitas kerja suatu kelompok. Jika seorang pemimpin dapat menerapkan kepemimpinannya dengan tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada, maka para anggota akan dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik dan benar.

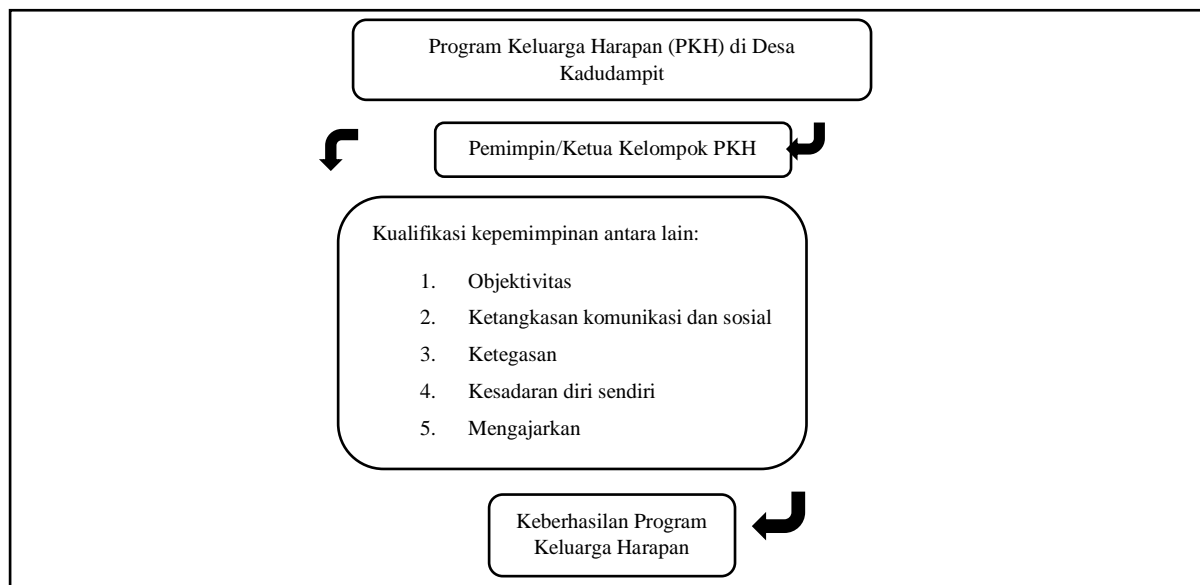
Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul Peran Kepemimpinan dalam Mendukung Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kadudampit.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Fadli, 2021)

Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi lokasi atau objek penelitian adalah Desa Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu ketua kelompok PKH di Desa Kadudampit.

Tabel 1. Kerangka Pikir Penelitian



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan oleh Kementerian Sosial, merupakan program bantuan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Dalam Program Keluarga Harapan, penerima manfaat dibagi menjadi beberapa kelompok dan ketua-ketua kelompok tersebut dipilih secara musyawarah dari penerima-penerima manfaat di kelompok tersebut. Kepemimpinan dalam konteks ini mempengaruhi (*influencing*) kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Rost (dalam Northouse 2013: 6), Perhatian terhadap tujuan bersama memberi kepemimpinan suatu nada tambahan yang etis, karena hal itu menekankan kebutuhan bagi pemimpin untuk bekerja bersama pengikut guna mencapai tujuan tertentu. Penekanan pada mutualitas mengurangi kemungkinan bahwa pemimpin melakukan tindakan kepada pengikutnya dalam cara yang tidak etis atau secara paksa. Hal itu juga meningkatkan kemungkinan bahwa pemimpin dan pengikut akan bekerja bersama demi kebaikan bersama.

Menurut Pengurus Program Keluarga Harapan Kabupaten Sragen ([Program Keluarga Harapan \(ppkhsragen.com\)](http://ppkhsragen.com)), adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan anak di bawah 6 tahun dari KPM.
- c. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak-anak (usia wajib belajar SD/SMP) KPM.
- d. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KPM.

Dalam hal ini untuk mencapai tujuan bersama Program Keluarga Harapan (PKH), ketua kelompok PKH berperan dalam meningkatkan akses pelayanan

pendidikan dan kesehatan bagi KPM PKH di Desa Kadudampit. Peran ketua kelompok PKH adalah membantu memastikan dan melaporkan kehadiran siswa/i di sekolah serta bagi ibu hamil/nifas dan balita dalam kegiatan posyandu.

Kepemimpinan dalam memenuhi tujuan bersama dapat diwujudkan sebaik-baiknya melalui indikator/kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2013), kualifikasi berikut yang terutama diperlukan yaitu:

#### 1. Objektivitas

Dari setiap tindakan, pemimpin mampu untuk mengidentifikasi sebab dan akibat yang ditimbulkan serta mampu membuat keputusan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat. Kejadian beberapa penerima manfaat tidak mendapatkan bantuan tunai ketika memasuki periode bantuan merupakan kejadian yang tidak jarang terjadi dalam PKH, termasuk di Desa Kadudampit ini. Pemimpin dalam konteks ini harus bisa mengantisipasi pertanyaan dan protes dari penerima-penerima bantuan yang mendapati kendala dalam bantuannya meskipun ketua kelompok juga merupakan seorang penerima bantuan. Ada banyak faktor dan urgensi yang dapat menyebabkan seorang penerima manfaat melakukan tindakan tersebut, maka dari itu pemimpin harus dapat berpikir tenang dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingkah laku anggota tanpa menghakimi terlebih dahulu. Hal ini didapatkan dari wawancara dengan salah satu ketua kelompok PKH yaitu seorang ibu berinisial YY (1 Agustus 2022)

*“Bantuan PKH tidak setiap saat semuanya dapat, tapi Alhamdulillah kelompok saya mayoritas dapat semua setiap periode. Terkadang ketika baru hari pertama di periode bantuan, ada saja yang bertanya kepada saya bantuan periode ini kapan turunnya? Atau ketika sudah memasuki pertengahan periode ada juga yang bertanya kenapa bantuan*

*saya tidak turun-turun ya? Saya biasa menjawab kalau bantuan itu tidak semua dapat setiap saat dan sayapun tidak bisa memberi alasan kepada kalian satu persatu kenapa bantuan kalian beberapa belum turun. Saya yakin dibalik pertanyaan mereka juga ada kebutuhan yang harus mereka penuhi, mungkin mendesak bahkan. Ketika ada pertemuan kelompok ini atau kegiatan lain di mana ada anggota saya yang menghadapi kendala tersebut, saya selalu mencoba untuk bertanya dan mencari tahu alasannya dibalik tindakan mereka, ada yang ternyata harus membayar listrik, ada juga untuk kebutuhan lain tugas-tugas anaknya sekolah, ada juga untuk biaya berobat, seperti itu.”*

## 2. Ketangkasan Komunikasi dan Sosial

Pemimpin harus mampu berbicara dan menyimpulkan dengan teliti pernyataan dari orang lain. Purba (2019) berpendapat bahwa suatu komunikasi dapat dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan dari sumber pesan dapat diterima dan diartikan oleh sasaran komunikasi (penerima pesan). Fungsi kepemimpinan ini lebih ditekankan kepada kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan sasaran, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan kepada anggota. Agar komunikasi tetap

terjalin secara dua arah, ketua-ketua kelompok PKH sebagai pemimpin melakukan perencanaan untuk menangani tantangan teknis dalam komunikasi seperti ketidakmampuan anggota memberi respon karena keterbatasan teknologi dan juga merencanakan penempatan diri pada kegiatan tertentu seperti posyandu dan kelompok tani sehingga pemimpin juga terlihat dan bisa untuk didekati.

## 3. Ketegasan

Ketegasan dalam kepemimpinan yaitu kemampuan untuk memproyeksikan diri secara mental dan emosional secara membangun kepada seorang anggota dalam mengembangkan kemampuannya dan mencapai tujuan bersama. Ini akan menimbulkan rasa hormat dan kepercayaan dari orang lain, meskipun orang tersebut tidak sependapat dengan pemimpin. Menurut Leiwakabessy (2018), Kepemimpinan yang akan menyebabkan anggota nyaman ketika pemimpin berdiri paling depan, memberikan berbagai ide dan gagasan konstruktif bahkan perlindungan ketika ia bersama dengan anggotanya. Kenyamanan yang dimiliki anggota akan menumbuhkan sikap loyal terhadap pemimpin dan sikap komitmen terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Hal ini dapat terlihat di tabel jumlah laporan pencairan penerima bantuan selama 2021 hingga periode terbaru pada tahun 2022,

Tabel 2. Jumlah Laporan Pencairan Program Keluarga Harapan (PKH)

Kelompok PKH		Jumlah Laporan Kelompok											
		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
Jumlah Anggota		31	16	15	17	28	25	23	28	21	16	25	
Tahun 2021	Periode	I	23	16	-	14	-	-	19	27	18	16	10
		II	22	16	-	15	-	16	12	27	18	15	10
		III	23	16	3	16	-	-	11	27	18	16	10
		IV	30	14	-	16	-	16	11	27	18	13	10
Tahun 2022		I	22	14	-	17	13	20	-	21	18	13	10
		II	30	14	-	17	11	20	-	21	18	12	10

Persentase Laporan (%)	80,7	93,8	3,3	93,1	14,2	48	38,4	89,2	85,7	88,5	40
------------------------	------	------	-----	------	------	----	------	------	------	------	----

\* Kelompok 6 tergabung dengan kelompok 12.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 kelompok (kelompok satu, dua, empat, sembilan, sepuluh, dan sebelas) dari 11 kelompok yang mencapai persentase laporan lebih dari 50%. Terlihat melalui tabel ini memang adanya ketegasan, komitmen, dan kolektivitas dalam menjalankan kewajiban antara beberapa pemimpin dengan anggotanya dalam mencapai tujuan bersama yaitu pelaporan pencairan bantuan periodik.

#### 4. Kesadaran diri sendiri

Pemimpin perlu mengetahui kesan yang telah ia tanamkan pada anggota atau orang lain tentang dirinya, sebaik-baiknya kesadaran pemimpin adalah juga bisa menyesuaikan atau melakukan peran yang diharapkan juga oleh anggotanya. Tidak hanya itu, Hamalik (dalam Astria 2013) berpendapat bahwa seorang pemimpin juga harus berupaya mendorong dan menumbuhkan kesadaran kepada anggotanya untuk mencapai perubahan yang diharapkan dalam memenuhi tujuan bersama. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pemrakarsa saja, melainkan aktif memberikan pengaruh yang juga berupa kemudahan bagi para anggotanya. Penanaman kesadaran diri tidak hanya berlaku untuk pemimpin, tetapi juga kepada para anggotanya. Menurut Burt Nannus (dalam Susanto & Andi 2013), ketika pemimpin mampu membawa perubahan pada kelompoknya dengan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dan memperkenalkan anggota dengan konsep/perspektif baru, maka pemimpin di sini dapat disebut sebagai agen perubahan (*Agent of Change*).

Hal ini dapat ditemukan di ketua kelompok PKH, yaitu ketua kelompok PKH melakukan evaluasi terhadap kepemimpinannya sendiri terkait keputusan yang diberikan kepada kelompoknya dan kesan anggota kelompok terhadap kepemimpinannya. Seperti ketika periode pencairan PKH dan terdapat anggota yang

memerlukan bantuan mengenai pencairannya dalam jumlah yang besar, maka ketua kelompok PKH tetap amanah dalam memberikan bantuannya sesuai dengan nominal yang harus diterima oleh anggotanya. Selain itu juga diadakan pertemuan ketua kelompok PKH setiap bulannya guna mengevaluasi kepemimpinan dan kelompoknya serta sebagai pembelajaran mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

#### 5. Mengajarkan

Pemimpin mampu menggunakan kecakapan untuk mengajarkan sesuatu yang positif melalui mengilhami, motivasi, demonstrasi, dan evaluasi pemahaman anggota. Menghubungkan dengan pengertian ini, Krech (1962) berpendapat bahwa pemimpin harus sekaligus berperan sebagai ahli dan model bagi para anggotanya. Dalam konteks sebagai ahli, pemimpin berlaku sebagai sumber pengetahuan dan keahlian di mana anggota bergantung kepada pemimpin untuk mengajarkan serta mendemonstrasikan keahlian yang dibutuhkan dalam memenuhi peran anggota masing-masing. Sebagai model, pemimpin dapat mengilhami anggotanya dengan menjadi figur yang bisa dicontoh seperti pola pikir kritis dan sikap objektif dalam menghadapi tantangan kelompok sehingga anggota mendapat indikasi dalam apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan dalam situasi tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketua kelompok PKH memiliki kualifikasi dalam mengajarkan anggota baik sebagai ahli maupun sebagai model. Sebagai ahli, ketua kelompok PKH mengajarkan cara mencairkan dana PKH melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikarenakan terdapat beberapa anggota yang tidak paham mengenai pencairan uang menggunakan mesin. Adapun sebagai model ketua kelompok PKH menjadi figur bahwa setiap pencairan dana PKH maka

diharuskan untuk mengumpulkan struktur laporan pencairan PKH. Hal ini dilakukan guna terpenuhinya data mengenai pencairan PKH di Desa Kadudampit.

#### 4. KESIMPULAN

Peran kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menciptakan efektivitas kerja sebuah kelompok. Dalam Program Keluarga Harapan peran ketua kelompok sangatlah penting dalam keberhasilan program tersebut. Dalam menjalankan peran sebagai pemimpin kelompok, ketua kelompok diharapkan mampu mengarahkan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dan mencapai suatu keberhasilan program. Terdapat beberapa kualifikasi yang diperlukan diantaranya yaitu:

- a. Objektivitas
- b. Ketangkasan komunikasi dan sosial
- c. Ketegasan
- d. Kesadaran diri sendiri
- e. Mengajar

Berdasarkan kelima aspek kualifikasi kepemimpinan di atas, ketua kelompok Program Keluarga Harapan Desa Kadudampit memiliki kualifikasi peran kepemimpinan dalam mencapai keberhasilan PKH di Desa Kadudampit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa dan partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 135–150.
- Alfiah, N. I., & Syafriani, I. (2019). Peran Pemimpin Transformasional dalam Penguatan Kelembagaan (Studi di Dinas Koperasi UMKM, Kabupaten Sumenep). *Journal of Governance Innovation*, 1(2), 37–48.
- Astria, D. F. (2013). Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Di Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 1–13.
- Daswati. (2012). Implementasi Peran Kepemimpinan dengan Gaya Kepemimpinan menuju Kesuksesan Organisasi. *Jurnal ACADEMICA Fisip UNTAD*, 04(01), 783–798.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
- Fitrianingrum, D., & Suyanto, T. (2014). Peran Pendamping Dan Ketua Kelompok Dalam Pemanfaatan Dana Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Talok. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 03(02), 753–768.
- Krech, D., Crutchfield, R. S., & Ballachey, E. L. (1962). *Individual in Society (IS)*. California: Mcgraw-Hill Kogakusha.
- Leiwakabessy, D. R. (2018). Pengaruh Peran Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Tingkat Loyalitas Karyawan Pada Pt. Wapoga Mutiara Industries Biak. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 13(1), 46–58.
- Manfaat dan Tujuan PKH Tahun 2022 (<https://ppkhsragen.com/tentang-pkh/manfaat-dan-tujuan-pkh/>) diakses 30 September pukul 15.00.
- Northouse, P. G. (2013). *Kepemimpinan (Teori dan Praktek)* (B. Sarjiwi (Ed.); Enam). Jakarta: Indeks.
- Pengertian Program Keluarga Harapan Tahun 2022 (<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh/>) diakses 29 September 2022 pukul 20.00.
- Purba, J. H. (2019). Peran Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 5(1), 19–28.
- Susanto, H., & Andi, M. (2013). Peran Kepemimpinan Chief Information Officer (CIO) dalam Penyelerasan Strategi TI dan Bisnis. *Jurnal Informatika*, 7(1), 740–752.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen* (G. A. Ticoalu (Ed.); Empat bela). Jakarta: Bumi Aksara.

Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (2014). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29–34.